

MEMBACA ARAH PENDIDIKAN ASIA TENGGARA: ANALISIS KOMPARATIF PENDIDIKAN INDONESIA DAN MALAYSIA

Melawati Muhtaromah¹, Novi Sopirah², Sholeh Hidayat³

¹Magister PGSD FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²Magister FKIP Universitas Sultan ageng Tirtayasa

¹melawatimuhtaromah17@gmail.com, ²novisopirah11@gmail.com,

³sholeh.hidayat@untirta.ac.id

ABSTRACT

This study aims to compare education policies in Indonesia and Malaysia by examining the structure of education levels, curriculum implementation, language of instruction, funding systems, equity of access, and teacher quality. A descriptive-comparative method was employed through the analysis of policy documents, national reports, and research findings from the last ten years. The results indicate that both countries share a strong commitment to improving the quality and equity of education, yet they adopt different policy approaches. Indonesia tends to implement more dynamic curriculum reforms and uses Indonesian as the sole national instructional language, whereas Malaysia applies more centralized policies with both Malay and English as instructional languages. In terms of funding and equity, Malaysia demonstrates greater consistency, while Indonesia faces geographical and regional disparities. Both countries continue to encounter challenges related to teacher competency and equitable education services. These findings provide a comprehensive overview of the strengths, similarities, and challenges of each country, serving as a basis for developing more effective education policies in Southeast Asia.

Keywords: Education policy Indonesia and Malaysia 1, equity 2, teacher quality 3

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan pendidikan di Indonesia dan Malaysia dengan menitikberatkan pada aspek struktur jenjang pendidikan, kurikulum, bahasa pengantar, pendanaan pendidikan, pemerataan akses, serta mutu dan profesionalisme guru. Kajian komparatif ini penting dilakukan mengingat kedua negara memiliki latar belakang sosial, budaya, dan historis yang relatif serumpun, namun menunjukkan dinamika kebijakan pendidikan yang berbeda dalam merespons tantangan global dan kebutuhan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-komparatif dengan teknik analisis dokumen terhadap regulasi pendidikan, laporan resmi pemerintah, serta hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang relevan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas pemerataan akses layanan pendidikan bagi seluruh warga negara. Perbedaan pendekatan kebijakan yang cukup signifikan. Indonesia cenderung menerapkan reformasi kurikulum secara dinamis dan periodik sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik, dengan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar utama di seluruh jenjang

pendidikan. Sebaliknya, Malaysia menerapkan kebijakan pendidikan yang lebih terpusat dan stabil, dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional serta bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pendamping, khususnya pada mata pelajaran tertentu. Pada aspek pendanaan pendidikan dan pemerataan akses, Malaysia menunjukkan konsistensi kebijakan yang relatif lebih kuat, baik dari segi alokasi anggaran maupun distribusi sumber daya pendidikan. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan besar yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, luas wilayah, serta disparitas pembangunan antar daerah. Dalam hal mutu guru, kedua negara sama-sama menghadapi permasalahan terkait peningkatan kompetensi, pemerataan kualitas tenaga pendidik, serta keberlanjutan program pengembangan profesional guru.

Kata Kunci: Kebijakan pendidikan Indonesia Malaysia 1, pemerataan akses 2, mutu guru 3

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional karena berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing negara di tengah perubahan global. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara serumpun di kawasan Asia Tenggara, memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kebijakan-kebijakan strategis di tingkat nasional. Meskipun memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang relatif serupa, arah kebijakan pendidikan kedua negara menunjukkan karakteristik yang berbeda, baik dalam hal perumusan, implementasi, maupun orientasi jangka panjang. Perbedaan tersebut menarik untuk dikaji mengingat Indonesia dan Malaysia sama-sama

berupaya memperkuat kualitas pendidikan dasar hingga menengah guna menghadapi tantangan global abad ke-21.

Perkembangan global yang ditandai dengan kemajuan teknologi, mobilitas tenaga kerja lintas negara, serta tuntutan kompetensi abad ke-21 telah mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menata kembali arah kebijakan pendidikannya. Pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai proses transfer pengetahuan, melainkan sebagai instrumen strategis dalam membangun daya saing bangsa, memperkuat identitas nasional, dan menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan menjadi faktor kunci yang menentukan kualitas sistem

pendidikan suatu negara secara berkelanjutan.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang menarik untuk dikaji secara komparatif karena memiliki kedekatan historis, budaya, dan sosial, namun berkembang dalam kerangka kebijakan pendidikan yang berbeda. Kedua negara sama-sama menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional, tetapi menerapkan pendekatan kebijakan yang tidak sepenuhnya sama dalam aspek kurikulum, tata kelola, pendanaan, dan pengembangan sumber daya manusia pendidikan. Perbedaan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, tetapi juga oleh kondisi geografis, struktur demografis, serta pilihan strategi pembangunan jangka panjang masing-masing negara. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menunjukkan kecenderungan reformasi kebijakan pendidikan yang cukup intensif, khususnya pada aspek kurikulum dan pembelajaran. Perubahan dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan peserta didik yang beragam serta tuntutan

global. Namun, dinamika kebijakan yang relatif cepat ini juga menimbulkan tantangan dalam implementasi, terutama pada kesiapan guru dan satuan pendidikan di daerah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan yang adaptif dapat berjalan efektif dalam sistem pendidikan yang sangat beragam. Di sisi lain, Malaysia cenderung mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih stabil dan terencana dalam jangka panjang, sebagaimana tercermin dalam *Malaysia Education Blueprint 2013–2025*. Pendekatan ini menekankan kesinambungan kebijakan, standardisasi mutu, serta penguatan peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan. Stabilitas kebijakan tersebut memungkinkan sekolah dan guru memiliki arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kurikulum, meskipun di sisi lain berpotensi membatasi ruang inovasi berbasis konteks lokal. Perbandingan kebijakan pendidikan Indonesia dan Malaysia menjadi penting untuk memahami bagaimana pilihan kebijakan memengaruhi mutu pendidikan, pemerataan akses, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global.

Kajian komparatif tidak dimaksudkan untuk menilai mana kebijakan yang lebih unggul, melainkan untuk mengidentifikasi praktik baik (*best practices*) dan keterbatasan masing-masing sistem yang dapat menjadi bahan pembelajaran kebijakan (*policy learning*). Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih seimbang dan kontekstual dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan mengalami transformasi signifikan melalui Kurikulum Merdeka yang menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi, diferensiasi, penguatan projek profil pelajar Pancasila, serta peningkatan fleksibilitas sekolah dalam mengatur proses belajar (Kemendikbudristek, 2022). Di sisi lain, Malaysia telah lebih dahulu mengimplementasikan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), yang menekankan keseimbangan antara aspek pengetahuan, kemahiran, dan nilai melalui kerangka Falsafah Pendidikan Kebangsaan (*Ministry of Education Malaysia, 2018*). Kedua negara juga menghadapi isu serupa

seperti pemerataan kualitas guru, akselerasi digitalisasi pembelajaran, serta tuntutan peningkatan performa dalam asesmen internasional seperti PISA. Kebutuhan untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan kedua negara berkembang dan sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Meskipun sejumlah studi komparatif telah dilakukan, sebagian besar hanya menyoroti aspek kurikulum atau struktur pendidikan tanpa menganalisis pendekatan kebijakan secara lebih holistik. Misalnya, penelitian oleh Ahmad & Abdul Kadir (2020) lebih menitikberatkan pada perbandingan kurikulum dasar, sementara studi oleh Setiawan (2021) berfokus pada kualitas guru dan kompetensi pedagogik. Dibutuhkan penelitian yang lebih komprehensif yang tidak hanya meninjau elemen kurikulum, tetapi juga mencakup konteks kebijakan, implementasi, dan implikasinya bagi mutu pendidikan.

Secara teoretis, penelitian ini mengacu pada kerangka analisis kebijakan pendidikan menurut Dunn (2018) dan Dye (2017), yang memandang kebijakan sebagai rangkaian keputusan strategis yang

dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif, penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan Indonesia dan Malaysia dirumuskan, dijalankan, serta dampaknya terhadap sistem pendidikan nasional masing-masing. Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini menyajikan perbandingan kebijakan Indonesia-Malaysia secara lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek kurikulum, pendanaan, pemerataan akses, dan pengembangan profesional guru dalam satu kerangka analisis. Kedua, kajian ini menghubungkan hasil perbandingan kebijakan dengan konteks global seperti kesiapan kompetensi abad ke-21 dan tuntutan teknologi pendidikan. Ketiga, penelitian ini menawarkan model sintesis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat diadaptasi oleh kedua negara, sesuatu yang belum banyak dilakukan dalam studi terdahulu.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan karakteristik kebijakan pendidikan nasional Indonesia dan Malaysia,

menganalisis persamaan dan perbedaan kebijakan pendidikan kedua negara berdasarkan kerangka analisis kebijakan. Mengidentifikasi implikasi kebijakan terhadap kualitas pendidikan dan tantangan menyusun dan implementasinya. kebijakan yang relevan bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kajian perbandingan kebijakan pendidikan di kawasan Asia Tenggara serta memperkaya literatur terkait transformasi kebijakan pendidikan di negara berkembang.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih memfokuskan kajian perbandingan pendidikan Indonesia dan Malaysia pada aspek tertentu secara terpisah, seperti kurikulum atau mutu guru, tanpa mengaitkannya secara utuh dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menyajikan analisis yang lebih menyeluruh, mencakup kurikulum, pemerataan akses, pendanaan, serta pengembangan profesional guru, sehingga dapat

memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai arah dan implikasi kebijakan pendidikan di kedua negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan metode analisis dokumen (*documentary analysis*). Pendekatan ini dipilih untuk membandingkan kebijakan pendidikan Indonesia dan Malaysia secara sistematis melalui penelaahan dokumen kebijakan, laporan resmi, dan penelitian terdahulu. Metode ini memungkinkan peneliti mengkaji isi kebijakan, konteks implementasinya, serta implikasinya tanpa melakukan intervensi langsung terhadap objek penelitian. Tahapan penelitian ini meliputi Identifikasi dan pengumpulan dokumen, Klasifikasi dokumen, Analisis isi dan komparasi, Penyusunan matriks perbandingan dan Penarikan kesimpulan dan rekomendasi.

Objek penelitian ini adalah dokumen kebijakan pendidikan nasional di dua negara, meliputi UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kebijakan Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, dan dokumen pendukung dari

Kemendikbudristek serta Dokumen Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), Malaysia Education Blueprint, dan dokumen Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE). Ruang lingkup penelitian difokuskan pada empat komponen kebijakan utama, Kurikulum, Pemerataan dan akses pendidikan, mutu dan kompetensi guru, pendanaan dan manajemen pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) untuk memperoleh rujukan teoretis dan hasil penelitian terdahulu; Analisis Dokumen (*Documentary Studies*) dengan memilih dokumen kebijakan yang relevan, valid, dan terbaru; Data Sekunder dari laporan internasional seperti PISA, UNESCO *Global Education Monitoring*, dan statistik pendidikan nasional.

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, variabel yang digunakan berupa komponen kebijakan pendidikan, yaitu Kurikulum sebagai kebijakan yang mengatur tujuan pembelajaran, struktur mata pelajaran, standar kompetensi, dan pendekatan

pedagogi di tingkat dasar dan menengah; Pemerataan dan Akses sebagai upaya negara dalam menyediakan pendidikan yang setara bagi seluruh warga, termasuk pemerataan fasilitas, partisipasi sekolah, dan kesempatan belajar; mutu guru sebagai kebijakan mengenai kualifikasi, pelatihan, pengembangan profesional, sertifikasi, serta standar kompetensi tenaga pendidik; serta Pendanaan Pendidikan sebagai Sistem pembiayaan pendidikan nasional, alokasi anggaran, mekanisme distribusi dana, serta keberlanjutan investasi pendidikan. Setiap variabel tersebut dioperasionalkan dalam bentuk indikator tertentu yang dibandingkan antarnegara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dokumen kebijakan dan laporan pendidikan nasional kedua negara, terlihat bahwa efektivitas kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh konsistensi implementasi dan kapasitas sistem dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pembelajaran. Dalam konteks ini, Indonesia dan Malaysia

menunjukkan kecenderungan kebijakan yang berbeda namun saling melengkapi.

Di Indonesia, fleksibilitas kebijakan kurikulum melalui Kurikulum Merdeka memberikan ruang inovasi yang luas bagi satuan pendidikan dan guru. Sekolah diberi keleluasaan dalam mengembangkan kurikulum operasional sesuai konteks lokal, karakteristik peserta didik, serta ketersediaan sumber daya. Secara konseptual, pendekatan ini sejalan dengan paradigma *school-based curriculum development* yang menempatkan sekolah sebagai aktor utama peningkatan mutu pembelajaran. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan guru dan dukungan sistem yang memadai. Akibatnya, terjadi variasi kualitas implementasi antarwilayah dan antar sekolah, terutama antara daerah perkotaan dan wilayah 3T. Sebaliknya, Malaysia menunjukkan kekuatan pada aspek stabilitas dan kesinambungan kebijakan. Kurikulum KSSR dan KSSM relatif jarang mengalami perubahan fundamental, sehingga sekolah dan guru memiliki

waktu yang cukup untuk memahami, menginternalisasi, dan mengoptimalkan implementasi kurikulum. Stabilitas ini berdampak positif terhadap konsistensi capaian pembelajaran dan pemerataan mutu antarwilayah. Hasil kajian ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan pendidikan yang stabil cenderung lebih mudah diimplementasikan secara sistemik, terutama dalam konteks negara dengan sistem pemerintahan yang terpusat.

Pada aspek pemerataan akses pendidikan, perbedaan pendekatan kedua negara juga tampak jelas. Indonesia telah mengembangkan berbagai skema afirmasi seperti BOS Afirmasi, program SM-3T, dan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu. Namun, luas wilayah dan tantangan geografis menyebabkan dampak kebijakan tersebut belum sepenuhnya merata. Data dan temuan penelitian menunjukkan bahwa akses pendidikan di daerah terpencil masih sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dan ketersediaan infrastruktur dasar. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan di Indonesia memberikan peluang inovasi lokal, tetapi sekaligus menghadirkan risiko

ketimpangan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan pendampingan yang kuat.

Malaysia, melalui sistem pendanaan yang terpusat, mampu memastikan bahwa sekolah di wilayah pedalaman tetap mendapatkan layanan pendidikan yang relatif setara dengan sekolah di wilayah perkotaan. Penyediaan fasilitas pendukung seperti asrama, transportasi sekolah, dan distribusi guru yang terencana menjadi faktor kunci keberhasilan pemerataan akses. Temuan ini menunjukkan bahwa sentralisasi pendanaan, apabila dikelola secara akuntabel, dapat menjadi instrumen efektif untuk mengurangi kesenjangan pendidikan.

Mutu dan profesionalisme guru menjadi isu sentral di kedua negara. Indonesia telah melakukan berbagai terobosan melalui PPG, Guru Penggerak, dan komunitas belajar guru. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak program-program tersebut masih belum merata, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pelatihan dan pendampingan profesional. Di sisi lain, Malaysia menempatkan pengembangan profesional guru sebagai proses berkelanjutan yang

terintegrasi sejak tahap pendidikan prajabatan hingga masa tugas. Sistem *Continuous Professional Development* (CPD) yang terstruktur mendorong peningkatan kompetensi guru secara konsisten dan terukur. Dari perspektif kebijakan, perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau inovasi kebijakan, tetapi juga pada keselarasan antara perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Indonesia memiliki keunggulan dalam semangat reformasi dan adaptasi terhadap perubahan global, sementara Malaysia unggul dalam konsistensi kebijakan dan pemerataan sistem.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembelajaran kebijakan (*policy learning*) antarnegara menjadi penting. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Malaysia dalam hal stabilitas regulasi, pemerataan pendanaan, dan pengembangan profesional guru yang berkelanjutan. Sebaliknya, Malaysia dapat mengadopsi pendekatan Indonesia dalam memberikan ruang inovasi dan fleksibilitas pembelajaran yang lebih

kontekstual dan berpusat pada peserta didik.

Tabel 1 Perbandingan Kebijakan Pendidikan Indonesia dan Malaysia

Aspek	Indonesia	Malaysia
Jenjang Pendidikan	PAUD – SD – SMP – SMA/SMK – PT; variasi jalur termasuk kesetaraan dan madrasah.	Prasekolah – Sekolah Rendah – Sekolah Menengah – Tingkatan Enam – PT; lebih terstandardisasi.
Kurikulum	Kurikulum Merdeka; dinamis dan sering berubah; fokus diferensiasi & P5.	KSSR & KSSM; stabil, terstruktur, dan sangat terstandar.
Bahasa Pengantar	Bahasa Indonesia; bahasa daerah sebagai muatan lokal.	Bahasa Malaysia; Bahasa Inggris kuat; ada sekolah Mandarin/Tamil.
Biaya Pendidikan	SD-SMP dibiayai pemerintah (BOS); masih ada biaya tambahan.	Gratis hampir sepenuhnya; subsidi buku & transportasi tersedia.
Waktu Belajar	Relatif lebih panjang: 5–6 hari/minggu, 32–38 JP.	Lebih singkat dan efisien; 5 hari/minggu.
Transportasi	Belum merata, terutama di daerah 3T.	Cukup merata; fasilitas school bus tersedia.
Seragam	Seragam nasional: putih-merah (SD), putih-biru (SMP), putih-abu (SMA).	Seragam nasional konsisten di seluruh negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar

kebijakan pendidikan kedua negara terletak pada struktur tata kelola, stabilitas regulasi, dan prioritas pembangunan. Indonesia, dengan bentuk negara yang luas dan beragam, menerapkan desentralisasi pendidikan sehingga memberikan otonomi kepada daerah. Namun hal ini menimbulkan variasi kualitas pendidikan yang cukup tajam antarwilayah. Sebaliknya, Malaysia menerapkan kebijakan sentralistik sehingga kontrol mutu lebih konsisten. Kurikulum Indonesia yang sangat dinamis menunjukkan adaptasi terhadap perubahan global, namun perubahan yang terlalu cepat mengakibatkan guru dan satuan pendidikan kewalahan. Penelitian-penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa perubahan kurikulum berulang kali adalah salah satu hambatan terbesar dalam pemerataan kualitas pembelajaran. Malaysia, dengan stabilitas kurikulumnya, mampu memberikan arah yang jelas kepada sekolah sehingga proses implementasi lebih terukur dan terencana.

Bahasa pengantar pendidikan juga menjadi perbedaan signifikan. Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu,

sementara Malaysia mengadopsi kebijakan multibahasa yang mempersiapkan peserta didik menghadapi kompetisi global melalui penguatan Bahasa Inggris. Mutu guru di Malaysia cenderung lebih baik karena proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan profesi yang ketat dan berkelanjutan. Di Indonesia, peningkatan mutu guru sudah meningkat melalui program PPG dan Guru Penggerak, tetapi masih menghadapi tantangan pemerataan. Dari segi pendanaan, Malaysia lebih efektif dalam distribusi anggaran pendidikan karena sifat sistem yang sentralistik. Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan dalam pengawasan penggunaan dana di daerah. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat studi sebelumnya yang menyatakan bahwa Malaysia menunjukkan konsistensi kebijakan yang lebih kuat, sedangkan Indonesia memiliki semangat reformasi yang tinggi namun konsistensi implementasinya masih menjadi tantangan.

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Indonesia dan Malaysia sama-sama berupaya menyediakan pendidikan yang bermutu, merata,

dan relevan, namun memiliki pendekatan yang berbeda dalam struktur pendidikan, kurikulum, bahasa pengantar, pendanaan, dan pemerataan akses. Indonesia lebih menonjol dalam fleksibilitas kurikulum dan keberagaman pendekatan pembelajaran, sedangkan Malaysia unggul dalam konsistensi kebijakan dan pemerataan dukungan pendanaan. Meski keduanya menghadapi tantangan seperti kualitas guru, kesenjangan antarwilayah, serta kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, baik Indonesia maupun Malaysia terus melakukan pembenahan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih setara, berkualitas, dan kompetitif.

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan stabilitas dan kesinambungan kebijakan pendidikan agar implementasi di lapangan lebih terarah, sebagaimana praktik yang cukup kuat dilakukan Malaysia. Indonesia dan Malaysia perlu memperluas dukungan pada daerah terpencil melalui penyediaan infrastruktur pendidikan, transportasi sekolah, serta peningkatan alokasi pendanaan berbasis kebutuhan wilayah.

Kedua negara perlu memperkuat pelatihan berkelanjutan (*continuous professional development*) yang adaptif dengan perkembangan teknologi, pendekatan pembelajaran abad 21, serta standar kompetensi global. Pemerintah perlu memastikan pendanaan pendidikan lebih efektif dan tepat sasaran, terutama untuk peningkatan fasilitas belajar, digitalisasi sekolah, dan kualitas layanan pendidikan dasar. Indonesia dan Malaysia disarankan terus memperbarui kurikulum agar responsif terhadap kebutuhan peserta didik, perkembangan teknologi, dan kesiapan daya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., & Hashim, R. (2018). Educational reform in Malaysia: Policy, leadership, and challenges. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(4), 469–477.
- Aisyah, S., & Prasetyo, Z. (2021). Evaluation of Indonesia's curriculum reform: Strengths, weaknesses, and future directions. *Journal of Education and Learning Studies*, 5(2), 101–112.
- Amin, M., & Yamat, H. (2020). Implementation of the Malaysian education blueprint: Issues and challenges. *International Journal of Advanced Research in Education and Society*, 2(1), 45–56.
- Anwar, S., & Fitriani, D. (2019). Teacher competency improvement in Indonesia: An

- analysis of policy and practice. *Journal of Educational Policy and Management*, 2(3), 155–167.
- Ariffin, R., & Ismail, N. (2016). Language policy and the use of English in Malaysian education. *Asian Education Studies*, 1(2), 35–44.
- Bashori, K., & Wulandari, R. (2022). Challenges of educational equity in Indonesia: A policy review. *Journal of Social Science Research*, 9(3), 245–258.
- Chew, F. P. (2019). Educational decentralization in Malaysia: Policy analysis and implications. *Malaysian Journal of Learning & Instruction*, 16(2), 1–24.
- Hasanah, U., & Putra, R. (2020). Funding allocation and efficiency in Indonesia's basic education system. *Journal of Public Sector Economics*, 6(1), 89–102.
- Ibrahim, S., & Mohamed, N. (2017). Quality of teachers in Malaysia: Issues and strategies. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 5(4), 1–7.
- Kusumawati, D., & Sari, N. (2018). The implementation of the 2013 curriculum in Indonesian schools. *International Journal of Education & Curriculum Studies*, 3(2), 22–33.
- Rahman, A., & Idris, F. (2019). Equity and access in Malaysian education: A review of national initiatives. *Asian Journal of Education and Training*, 5(3), 447–454.
- Samsudin, M. (2020). Education policy directions in Indonesia post-curriculum 2013. *Journal of Policy and Educational Development*, 8(1), 77–90.
- Saputra, H., & Widodo, S. (2021). Curriculum and language policy comparison in Indonesia and Malaysia. *Journal of Comparative Education Review*, 4(1), 56–70.
- Setiawan, B. (2022). Digital transformation and quality improvement in Indonesia's education system. *Journal of Technology in Education*, 6(2), 134–150.
- Yusoff, N., & Selvaraj, J. (2019). Challenges in Malaysian rural education: Access and quality issues. *International Journal of Education*, 12(1), 30–4